

Peningkatan Kapabilitas Petugas KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kelurahan Renon melalui Sosialisasi Tugas dan Kewajiban Petugas KPPS

Increasing the Capabilities of KPPS Officers in Organizing the 2024 Elections in Renon Subdistrict through Socialization of the Duties and Obligations of KPPS Officers

Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani *

I Gede Rizky Adi Wijaya

Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda

Department of Economics and Business, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia

email: devikalfika@undiknas.ac.id

Kata Kunci

Pemilihan Umum
KPPS
Kapabilitas

Keywords:

General Elections
KPPS
Capability

Received: March 2024

Accepted: August 2024

Published: September 2024

Abstrak

Pemilihan umum adalah proses di mana warga negara secara bebas memberikan aspirasi mereka dengan memilih calon pemimpin untuk kemajuan negara. Salah satu Keberhasilan dari pemilu yaitu adanya Petugas KPPS, Banyak permasalahan terkait dengan KPPS yang dihadapi di lapangan, KPPS merupakan bagian paling ujung dari badan ad hoc yang selalu menarik perhatian setiap pemilu. Permasalahan tersebut melibatkan keterbatasan dalam pemahaman regulasi, pelaksanaan teknis pemungutan suara, dan penghitungan suara dari Ketua dan Anggota KPPS. Dalam kegiatan ini ada 3 tahapan yang dilalui yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. yang pertama perencanaan tahapan perencanaan dilakukan dengan wawancara dan memberikan solusi dengan melakukan sosialisasi melalui BIMTEKs. Selanjutnya, memberikan evaluasi dengan memberikan pre-test dan post-test untuk mengetahui pemahaman dari petugas KPPS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Petugas KPPS terkait tugas dan kewajibannya sebagai Petugas KPPS sehingga tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di Pemilihan Umum sebelumnya. Manfaat dari pelaksanaan Sosialisasi melalui BIMTEK ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kelurahan Renon. Hasil dari Sosialisasi melalui BIMTEK menunjukkan bahwa adanya peningkatan, yang awalnya 37% setelah mengikuti Sosialisasi melalui BIMTEK ini meningkat menjadi 95%.

Abstract

General elections are a process in which citizens freely express their aspirations by choosing potential leaders for the progress of the country. One of the successes of the election is the existence of KPPS officers. Many problems related to KPPS are faced in the field. KPPS is the very tip of the ad hoc body which always attracts attention every election. These problems involve limitations in understanding regulations, technical implementation of voting, and counting votes from the Chairman and Members of KPPS. In this activity, 3 stages are followed, namely planning, implementation, and evaluation. The first planning stage is carried out by interviews and providing solutions by conducting outreach through BIMTEKs. Next, provide an evaluation by giving a pre-test and post-test to determine the understanding of KPPS officers. This activity aims to increase the knowledge of KPPS Officers regarding their duties and obligations as KPPS Officers so that mistakes that occurred in the previous General Election no longer occur. The benefit of implementing socialization through BIMTEK is to improve the quality of holding general elections in Renon Village. The results of the socialization through BIMTEK show that there has been an increase, which was initially 37% after taking part in the socialization through BIMTEK, increasing to 95%.



© 2024 Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani, I Gede Rizky Adi Wijaya, Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.6835>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengungkapkan keinginan dan aspirasinya, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih calon pemimpin yang mereka percaya dapat memajukan negara mereka. Definisi pemilihan umum juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pemilihan umum adalah pengejawantahan dari kedaulatan rakyat yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Widodo *et al.*, 2023). Kegiatan pemilihan umum merupakan bagian integral dari pembangunan politik yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat berdasarkan demokrasi. Keberhasilan pembangunan tersebut tergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat (Pratama *et al.*, 2022). Berdasarkan a Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali" (Siagian *et al.*, 2022). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota diselenggarakan secara bersamaan. (Nahak *et al.*, 2019). Dalam konteks Pemilihan Umum, KPU memiliki tanggung jawab dan wewenang yang meliputi perencanaan program dan anggaran, penentuan jadwal pelaksanaan pemilu, penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, serta penyusunan dan penetapan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. (Boediningsih *et al.*, 2022). Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diatur dan diberikan oleh UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum memiliki otonomi, yang berarti bahwa Komisi Pemilihan Umum mampu menyelenggarakan semua jenis pemilu tanpa bergantung pada bantuan organisasi lain. Ini mencakup penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD di setiap daerah. (Ardhie, 2019).

Salah satu Keberhasilan dari pemilu yaitu adanya PetugasKPPS. Sebagai penyelenggara pemilu di level paling dasar, KPPS terdiri dari tujuh anggota dan dipilih oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utama KPPS adalah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk menjalankan tugas ini dengan transparan, tanpa keberpihakan, akurat, dan akuntabel, demokrasi akan terwujud.(Melinasari *et al.*, 2022). Banyak Masalah yang ada terkait dengan KPPS, yang merupakan bagian terbawah dari badan ad hoc yang selalu menjadi sorotan dari setiap pemilihan umum. Peserta pemilu sering kali tidak puas dengan kinerja KPPS, dengan tuduhan ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan mereka sering diajukan dalam proses pengaduan dan peradilan pemilu, tanpa mempertimbangkan keterbatasan yang mereka hadapi. Keterbatasan tersebut termasuk pemahaman terhadap regulasi, teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta kondisi fisik karena mereka bekerja sehari-hari. Sebelum hari pemungutan suara, saat terjadi kesalahan dalam pemilihan umum, KPPS sering menjadi fokus perhatian karena dianggap sebagai penentu kualitas pemilu. Penelitian Eduard Ola Bebe Gorantokan tentang Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014 menemukan beberapa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan C-1 Plano, serta dugaan penggelembungan suara. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan kekurangan dalam pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota KPPS dalam pemilu, terutama dalam hal pemahaman terhadap lembar model C, C1, dan lampiran C1. (Pandiangan, 2019). Situasi serupa terjadi Di 825 kelurahan dan kecamatan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo, peristiwa ini terjadi. Di situasi ini, KPPS meminta saksi untuk mencatat informasi yang harus dimasukkan ke dalam formulir C1. Selain itu, KPPS memanfaatkan kalender sebagai pengganti formulir C1 yang telah direncanakan (Ola *et al.*, 2014)

Dalam Pemilihan Umum 2019 kasus serupa terjadi di Kelurahan Renon yang dimana adanya kesalahan dari Petugas KPPS. Kelurahan Renon terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. memiliki luas 2,54 km² dan terdiri dari lima Banjar: Banjar Kaja, Banjar Kelod, Banjar Tengah, Banjar Peken, dan Banjar Pande. Kelurahan Renon memiliki 20.774 penduduk pada tahun 2016, dengan 10.443 perempuan dan 10.331 laki-laki.(Ratna Darmayanti *et al.*, 2022). Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 terungkap setelah melakukan wawancara dengan Ketua PPS pada

Pemilihan Umum tahun 2019 sejumlah Petugas KPPS terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kurangnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Permasalahan yang terjadi terkait dengan melakukan perhitungan jumlah surat suara dengan mencatat jumlah surat suara dengan tidak teliti selain itu Petugas KPPS ditemukan lalai dalam melengkapi berkas-berkas penting yang dibutuhkan dalam proses pemungutan suara.

Dalam mengatasi masalah tersebut, langkah yang bisa diambil adalah melaksanakan sosialisasi melalui BIMTEK (Bimbingan Teknis) secara menyeluruh kepada petugas KPPS. Melalui pelaksanaan sosialisasi melalui BIMTEK ini diharapkan para Petugas KPPS dapat diberikan pemahaman yang mendalam mengenai tugas-tugas yang harus mereka laksanakan. Selain itu melalui pelatihan ini juga para Petugas KPPS dapat mengasah keterampilan pengetahuan mereka sehingga mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik dan tanggung jawab. Dengan demikian diharapkan Petugas KPPS teliti dan baik dalam melaksanakan proses Pemilihan Umum di Kelurahan Renon tahun 2024. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan pemahaman Petugas KPPS terkait tugas dan kewajibannya sebagai Petugas KPPS sehingga tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di Pemilihan Umum sebelumnya. Manfaat dari pelaksanaan Sosialisasi melalui BIMTEK ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kelurahan Renon.

METODE

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Petugas KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di kelurahan Renon Ini dilakukan Pada Saat kegiatan BIMTEK (Bimbingan Teknis) di Kantor lurah Renon. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu dilakukannya sosialisasi dengan Pemberian Materi Mengenai tugas-tugas KPPS *Selama Pemilu Berlangsung*. Penyampaian materi Sosialisasi ini disampaikan oleh Ketua PPS Kelurahan Renon. serta memberikan Kuisisioner *pre-tes* dan *past test* kepada petugas KPPS sebanyak 20 orang. Adapun tahapan-tahapan dari sosialisasi ini yaitu:

Perencanaan

Pelaksanaan Di Dalam Tahapan Perencanaan sosialisasi ini merupakan tahapan utama yang perlu di perhatikan. Di dalam tahapan perencanaan ini dilakukannya wawancara dengan Ketua PPS sebelumnya terkait permasalahan Petugas KPPS pada Pemilu sebelumnya dan berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua PPS sebelumnya ada berbagai masalah terkait pemilu sebelumnya permasalahan yang terjadi terkait dengan penghitungan surat suara yang tidak teliti dan kurangnya melengkapi berkas-berkas yang di butuhkan. Dengan melihat permasalahan yang terjadi solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan sosialisasi BIMTEK, dengan memberikan materi terkait tugas-tugas dari setiap KPPS, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petugas KPPS terkait tugas dan Kewajibannya.

Pelaksanaan

Setelah dilakukannya Perencanaan maka selanjutnya dilakukannya pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi BIMTEK ini dilakukan pada tanggal 27 Januari 2024 di kantor Kelurahan Renon dengan pemaparan materi terkait tugas dan kewajiban Petugas KPPS oleh Ketua PPS sebagai narasumber.

Evaluasi

Untuk Mengetahui tingkat pengetahuan dari Petugas KPPS ini. Diberikannya pre-test dan past-tes pada saat sosialisasi Bimtek ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar.1 Rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kegiatan Pengabdian Peningkatan Kapabilitas Petugas KPPS dalam Penyelenggaraa Pemilu 2024 di Kelurahan Renon melalui Sosialisasi Tugas dan Kewajiban Petugas KPPS berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Dalam pelaksanaan Sosialisasi melalui BIMTEK ini dilakukan pada tanggal 26 Januari 2024 pada Pukul 18:00 Wita di kantor Kelurahan Renon, Peserta yang hadir waktu Sosialisasi melalui BIMTEK ini adalah Petugas KPPS dengan peserta yang hadir kurang lebih 50 orang. kegiatan ini diawali dengan mengisi registrasi setelah mengisi registrasi. Setelah mengisi registrasi peserta diarahkan memasuki ruangan rapat yang digunakan dalam sosialisasi melalui BIMTEK. Setelah semua peserta diarahkan memasuki ruangan rapat selanjutnya dibukanya sosialisasi melalui BIMTEK ini dan pemberian pre-test kepada peserta terkait materi tugas dan kewajiban Petugas KPPS. Setelah itu pemaparan materi Sosialisasi melalui BIMTEK ini disampaikan oleh Ketua PPS di Kelurahan Renon materi yang disampaikan mengenai tugas atau peraturan KPPS, tugas penyiapan TPS, tahapan pemungutan suara dan tata cara pencoblosan yang disampaikan selama 50 menit yang dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 2. Tampilan Peserta Sosialisasi Bimtek

Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Ketua PSS

Setelah pemaparan materi selesai dilakukan kegiatan di lanjutkan dengan sesi pelatihan surat c pleno kepada petugas KPPS Dan menjawab pertanyaan -pertanyaan terkait pelatihan tersebut. dan setelah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukannya diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Petugas KPPS yang mengikuti BIMTEK pada hari jumat 27 januari 2024. setelah diskusi berakhir kegiatan dilanjutkan dengan pemberian past-tes kepada petugas KPPS guna untuk mengukur pemahaman materi yang di berikan oleh Ketua PPS mengenai tugas dan kewajiban Petugas KPPS saat pemilu berlangsung.

Setelah mengumpulkan pre test dan past-test maka selanjutnya melakukan tahap evaluasi yang dimana untuk mengetahui keberhasilan dari program kerja ini. Pada tahapan evaluasi ini berdasarkan pre-test dan past-test yang di berikan terlihat jelas pada tabel satu dan tabel dua menunjukkan bahwa kegiatan Sosialisasi melalui BIMTEK ini memberikan dampak yang positif yang dimana pada awalnya peserta yang mengikuti sosialisasi ini itu banyak yang tidak mengetahui apa saja tugas dan kewajiban seorang Petugas KPPS yang jika dilihat pada tabel pre-test rata-rata yang mengetahui tugas dan kewajiban yaitu sebesar 37% dan setelah mengikuti Sosialisasi melalui BIMTEK ini para peserta yang mengikuti Sosialisasi ini dapat memahami materi yang disampaikan oleh Ketua PPS mengenai Tugas dan Kewajiban Petugas KPPS yang dapat dilihat pada tabel past-tes yang dimana pemahaman pada peserta yang mengikuti Sosialisasi ini meningkat dari awalnya 37%

setelah mengikuti Sosialisai melalui BIMTEK ini meningkat menjadi 95%.Ini menunjukkan bahwa kegiatan Sosialisasi melalui BIMTEK ini telah berhasil meningkatkan pemahaman Petugas KPPS Tugas dan Kewajibannya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kelurahan Renon. Dengan hasil yang telah di dapatkan ini diharapkan pada Petugas KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik di Pemilihan Umum 2024 di Kelurahan Renon.

Tabel I. Tabel Pre-test

NO	Indikator	Jumlah Soal	Iya	Tidak	Ragu-Ragu
1	Apakah sudah mengetahui tugas atau peraturan KPPS	1	40%	40%	20%
2	Apakah sudah mengetahui tugas masing-masing KPPS	1	45%	45%	10%
3	Apakah sudah mengetahui tugas dari persiapan pemungutan suara	1	30%	30%	40%
4	Apakah sudah mengetahui penyiapan TPS	1	30%	35%	35%
5	Apakah sudah mengetahui tugas Penerimaan Logistik	1	20%	45%	35%
6	Apakah sudah mengetahui Tahapan Pembuatan TPS	1	35%	40%	25%
7	Apakah Sudah mengetahui persiapan penghitungan suara	1	35%	50%	15%
8	Apakah sudah mengetahui tentang tahapan pemungutan suara	1	35%	40%	25%
9	Apakah sudah mengetahui tata cara pemungutan suara	1	45%	35%	20%
10	Apakah sudah mengetahui tata cara pencoblosan	1	55%	20%	20%
Rata-Rata			37%	38%	24,5%

Tabel II. Tabel Past-test

NO	Indikator	Jumlah Soal	Iya	Tidak	Ragu-Ragu
1	Apakah sudah mengetahui tugas atau peraturan KPPS	1	100%	0%	0%
2	Apakah sudah mengetahui tugas masing-masing KPPS	1	100%	0%	0%
3	Apakah sudah mengetahui tugas dari persiapan pemungutan suara	1	80%	0%	20%
4	Apakah sudah mengetahui penyiapan TPS	1	90%	0%	10%
5	Apakah sudah mengetahui tugas Penerimaan Logistik	1	100%	0%	0%
6	Apakah sudah mengetahui Tahapan Pembuatan TPS	1	100%	0%	0%
7	Apakah Sudah mengetahui persiapan penghitungan suara	1	80%	0%	20%
8	Apakah sudah mengetahui tentang tahapan pemungutan suara	1	100%	0%	0%
9	Apakah sudah mengetahui tata cara pemungutan suara	1	100%	0%	0%
10	Apakah sudah mengetahui tata cara pencoblosan	1	100%	0%	0%
Rata-Rata			95%	0%	5%

Hasil dari kegiatan Peningkatan Kapabilitas Petugas KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kelurahan Renon melalui Sosialisasi Tugas dan Kewajiban Petugas KPPS menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari Petugas KPPS yang awalnya sebelum mengikuti Sosialisasi melalui BIMTEK ini rata-rata pemahaman petugas KPPS sebelum dan setelah mengikuti Sosialisasi ini menunjukan bahwa kegiatan ini berhasil dengan meningkatnya pemahaman Petugas KPPS dalam menjalani Tugas dan Kewajibannya dalam Pemilihan Umum 2024. Dengan Sosialisasi melalui BIMTEK ini memberikan dampak positif bagi Petugas KPPS karena dengan diadakannya sosialisasi ini Petugas KPPS dapat mengetahui dan meningkatkan pemahaman Tugas dan Kewajiban pada Pemilihan Umum 2024. Dengan hasil yang diperoleh ini diharapkan Petugas KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Pemilihan Umum sebelumnya di Kelurahan Renon.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Sosialisasi melalui BIMTEK yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari kegiatan Sosialisai melalui BIMTEK pada Petugas KPPS mampu meningkatkan pemahaman pada Petugas KPPS di Kelurahan Renon dengan meningkatnya pemahaman dari petugas KPPS ini Diharapkan dapat meningkatkan kapabiilitas dari petugas KPPS agar tidak terjadi kesalahan pada pemilu sebelumnya. Saran yang dapat diberikan untuk pengabdian

masyarakat ini yaitu melakukan BIMTEK dan pelatihan pada petugas KPPS secara rutin agar dalam menjalani tugas dan kewajibannya dengan baik serta tidak terulangnya lagi kesalahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Kelurahan Renon yang telah menerima dalam kegiatan ini, terima kasih juga kepada Ketua PPS Kelurahan Renon I Ketut Wisnaya yang telah menjadi Narasumber pada sosialisasi ini, serta berterima kasih juga kepada Ketua PPS Sebelumnya yang telah diwawancarai terkait Petugas KPPS di Pemilihan Umum Sebelumnya di Kelurahan Renon I Ketut Wisnaya yang telah diwawancarai terkait Permasalahan petugas KPPS sebelumnya di Kelurahan Renon.

REFERENSI

- Ardhie, G. D. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pilkada Kota Medan Tahun 2015.
- Boediningsih, Widyawati, Cahyono, B., & Suparman. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288–301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>
- Melinasari, R., Hertanto, H., Warganegara, A., & Maryanah, T. (2022). Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja KPPS. *Jurnal Cahaya MANDALIKA*, 697–704.
- Nahak, Teti, U., Hukum, & Magister. (2019). Hubungan Kerja KPU dengan KPPS Dalam Penyelenggaraan PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. *Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 24(3), 147–155. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/735>
- Ola, E., Gorantokan, B., Kelompok, K., Pemungutan, P., & Kpps, S. (2014). *Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 1–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30535>
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>
- Pratama, B., Danang Wijaya Saputra, Elvika Permata Sari, Fitta Verolina Sinaga, Indra Syahputra Siahaan, Jumriani, J., Linda Safitri, M. Supra Setyo, Putri Geovani Mayori, & Sri Andini. (2022). Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 4821–4826. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i5.3553>
- Ratna Darmayanti, P. A., Sri Ariani, N. K., & Tertiana S, W. (2022). Edukasi Pencegahan Pengendalian Infeksi Covid-19 dan Distribusi Masker Pada Remaja di Kelurahan Renon Denpasar Selatan. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.52643/pamas.v6i1.1761>
- Siagian, A. W., Ferian Fajar, H., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 101–114. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- Widodo, E., Fauziah, S., Butsianto, S., Andriani, & Sunge, A. S. (2023). Klarifikasi Dalam Menentukan Peserta Pemilih Untuk Membantu Petugas Pantarlih Dalam Menentukan Hak Pemilih Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(7), 1–23.